DINAMIS: Fasilitas pelayanan publik dan pemerintahan pun terus berkembang, beberapa diantaranya, gedung kembar empat Pemkab Sleman, gedung DPRD Sleman, dan Mal Pelayanan Publik Sleman.

Menuju Masyarakat Sleman Lebih Sejahtera

Tingkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur Daerah

Era otonomi daerah menjadikan pembangunan wilayah Kabupaten Sleman kian masif. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Fasilitas pelayanan publik dan pemerintahan pun terus berkembang secara dinamis.

PELAKSANAAN pembangunan daerah tak bisa lepas dari tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan keuangan daerah yang kuat.

Kabupaten Sleman pernah menjadi daerah percontohan pelaksanaan otonomi daerah di penghujung masa kepemimpinan Bupati Drs., H. Arifin Ilyas (1990-2000).

Pada awal masa otonomi daerah terjadi peralihan kepemimpinan dari H. Arifin Ilyas kepada Drs., H. Ibnu Subiyanto, Akt. Bupati ke-11 Kabupaten Sleman ini menjabat selama dua periode pada 2000-2005 dan 2005-2010.

Ketika itu pendapatan asli daerah (PAD) Sleman hanya Rp 16,5 miliar. Jauh tertinggal dari Kota Jogja yang kala itu mencapai hampir Rp 60 miliar.

Ibnu Subiyanto lantas menyusun rencana strategi untuk mencari sumber pendapatan daerah yang lebih baik. "Pengembangan wilayah dan strategi yang benar akan mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus PAD secara signifikan," ungkapnya.

Ibnu menegaskan, pembangunan wilayah Sleman bisa sangat masif sampai sekarang karena desain dan strategi pemerintah daerah.

Strategi itu yang menjadi cikal bakal berdirinya pusat perbelanjaan modern (mal) pertama di Sleman. Yakni Ambarrukmo Plaza di wilayah Caturtunggal, Depok. Kawasan tersebut lantas berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah timur Sleman. Sedangkan pengembangan sektor barat dimulai dengan pembangunan Pasar Tlogorejo di Godean. Demikian pula di kawasan Jalan Magelang yang didesain sebagai pusat pertokoan.

Agar perekonomian Sleman terus bertumbuh, pengembangan wilayah digeser ke Maguwoharjo, Depok. Dibangunlah Stadion Internasional Maguwoharjo pada 2005. "Stadion ini bukan sekadar memenuhi aspirasi pecinta sepak bola. Tapi memang untuk menumbuhkan perekonomian dan pengembangan kawasan," kenang Ibnu.

Stadion tersebut juga didesain untuk perlindungan masyarakat ketika bencana alam atau sosial lainnya. Meski fungsi utamanya untuk pengembangan wilayah. "Dari fungsi stadion itu pengembangan wilayah kian luas. Roda bisnis di kawasan itu tumbuh. Harga tanah sekitarnya pun makin tinggi, sehingga pajak bumi bangunan ikut naik," jelas tokoh kelahiran 3 Maret 1950.

Bicara pembangunan daerah juga tak bisa lepas dari unsur birokrasi. Menurut Ibnu, semua fungsi birokrasi harus berjalan baik karena menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Satu di antaranya tentang perizinan.

IKONIK: Gedung Kaca Pemkab Sleman.

Ibnu mengatakan, perizinan adalah produk politik pengembangan daerah. Khususnya izin mendirikan bangunan (IMB, sekarang disebut PBG: perizinan bangunan gedung) dan izin pemanfaatan lahan. "Dari izin yang diterbitkan pemerintah daerah itu harus bisa menjadi sumber keuangan untuk perusahaan itu sendiri dan dampak positifnya bagi daerah," tuturnya.

Ibnu menegaskan, Sleman tumbuh dengan perhitungan rasional. Tidak asal-asalan.

Terkait birokrasi pemerintahan, kata Ibnu, harus dimulai dari kantor yang terbuka dan transparan. Staf kantor harus bisa saling berinteraksi, baik dengan sesama maupun masyarakat. "Birokrasi harus simpel melayani masyarakat," ujarnya.

Dari pemikiran tersebut, terbangunlah gedung kembar empat yang saat ini difungsikan sebagai kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pendidikan-Dinas Pemuda Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan-Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sleman Smart Regency

Pembangunan Sleman era modern berlanjut pada era kepemimpinan Bupati Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. Periode pertama masa jabatannya (2010-2015), Sri Purnomo menerapkan konsep keseimbangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

Pembangunan SDM diawali dengan program wajib belajar 12 tahun. Meski saat itu secara nasional dicanangkan program wajib belajar 9 tahun. Karena itulah Sri Purnomo mendapatkan penghargaan nasional bidang pendidikan untuk pertama kali.

Sleman sebagai pusat pelajar. Maka seluruh anak Sleman harus bisa merasakan *image* tersebut. Bagi anak dari keluarga miskin dibiayai oleh pemerintah. Bahkan Sri Purnomo mendorong anak-anak Sleman tak hanya tamat SMA. Tapi bisa kuliah.

Bupati lantas menginisiasi kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dengan mengundang para rektor. Agar anak-anak berprestasi Sleman bisa mendapatkan beasiswa kuliah. "Itu gayung bersambut dengan adanya program bidik misi," ungkapnya.

Sedangkan dalam birokrasi pemerintahan, rekrutmen dan penempatan pegawai didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan masing-masing. Promosi pegawai pun berbasis prestasi kinerja. "Konsepnya *the right man on the right place*. Supaya kinerja pemerintahan berjalan baik dan bisa lari kencang," ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Sri Purnomo fokus revitalisasi pasar tradisional. Pasar Prambanan menjadi ikonnya. Prinsipnya, pasar tradisional tidak boleh kalah dengan mal. Harus bersih dan tidak kumuh. Sehingga budaya masyarakat berbelanja di pasar rakyat tetap berjalan.

Periode kedua kepemimpinan Sri Purnomo (2016-2021) masuk era digitalisasi birokrasi. Pelayanan publik dengan konsep *smart regency*. Penerapan teknologi informasi untuk pelayanan publik mulai diuji coba Februari 2016. Dan berjalan efektif sejak 2018 ketika Presiden Joko Widodo mencanangkan program *smart city*.

Dengan teknologi informasi semua pengurusan administrasi kependudukan dan birokrasi pemerintahan menjadi lebih cepat dengan pemanfaatan aplikasi berbasis internet.

Hal itu paling terasa ketika masa pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan *start up* agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup meski tetap berada di rumah. Konsepnya jual beli secara *online*. "Bisnis *online* ini ternyata justru makin kencang meski sedang pandemi," ungkap Sri Purnomo.

Di akhir masa jabatannya sebagai bupati Sleman, Sri Purnomo turut membidani pembangunan kantor pemerintahan yang ikonik. Di antaranya, bangunan yang dikenal dengan sebutan Gedung Kaca. Di gedung tiga lantai ini terdapat ruang kerja bupati/wakil bupati, sekretaris daerah dan para asistennya, serta staf ahli bupati. Di lantai 3 juga terdapat ruang untuk pengamatan Gunung Merapi.

Sebelumnya juga telah dilakukan pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Sleman dan Mal Pelayanan Perizinan yang lebih representatif. Serta menara Masjid Agung Sleman, yang kini menjadi salah satu ikon wisata religi di Kabupaten Sleman.

Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Sleman berlanjut di era kepemimpinan Bupati Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo yang mengusung konsep pembangunan *"Sesarengan Mbangun Sleman"*.

Sampai saat ini Kustini sangat serius dalam peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Itu dikuatkan dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Dengan JPS, seluruh anak Sleman dari keluarga miskin dijamin pendidikannya. Bahkan ada bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Kustini juga menginisiasi sekolah vokasi bagi kalangan milenial dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi ternama. Khususnya untuk menciptakan sebanyak mungkin petani milenial di Sleman. "Dengan program JPS pendidikan tidak ada alasan lagi anak Sleman putus sekolah karena masalah biaya," tegas Kustini.

Demikian pula biaya pengobatan/perawatan kesehatan di rumah sakit bagi warga miskin dengan JPS kesehatan. Pemerintah Kabupaten Sleman menanggung premi bulanan untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di masa pandemi Covid-19, Kustini membangun jaringan internet di seluruh padukuhan. Program internet gratis terbukti sangat membantu siswa belajar secara daring. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga sangat terbantu dalam pemasaran produk secara *online* melalui aplikasi *marketplace*.

Untuk mewadahi semangat olahraga para pemuda, Kustini membangun *sport center* di 17 kapanewon. *Sport center* juga menjadi sarana interaksi positif anak-anak muda dalam upaya mendukung pembangunan Sleman.

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi prioritas Kustini dalam urusan birokrasi dan infrastruktur. "Akses jalan, fasilitas umum, dan sarana penerangan jalan harus bagus. Supaya ekonomi meningkat," tuturnya.

Dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat, Kustini merevitalisasi Pasar Godean. Jika Pasar Prambanan menjadi ikon wilayah timur Sleman, Pasar Godean ke depan akan menjadi ikon di wilayah barat. Sesuai rencana, Pasar Ngino menjadi target berikutnya untuk revitalisasi agar lebih representatif.

Rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik juga masuk agenda pembangunan saat ini. Lantai paling atas bangunan modern ini dikonsep terbuka untuk pelayanan umum. (*)

Nyawiji lan Murakabi
Sesarengan Mbangun Sleman
107th
Kabupaten Sleman
15 MEI 1916 - 15 MEI 2023

Birokrasi harus simpel melayani masyarakat."

IBNU SUBIYANTO
Bupati Sleman
Periode 2000-2005, 2005-2010

Konsepnya *the right man on the right place*. Supaya kinerja pemerintahan berjalan baik dan bisa lari kencang."

SRI PURNOMO
Bupati Sleman
Periode 2010-2015, 2016-2021

Akses jalan, fasilitas umum, dan sarana penerangan jalan harus bagus. Supaya ekonomi meningkat."

KUSTINI SRI PURNOMO
Bupati Sleman
Periode 2021-sekarang

Dongkrak PAD, Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah

PAJAK daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang sangat potensial.

Setiap tahun PAD Sleman selalu meningkat. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan PAD Rp 1,06 triliun. Dari target tersebut potensi capaiannya bisa tembus Rp 1,1 triliun. "Itu harapan kami jika tak ada kendala berarti dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 bisa berjalan konsisten," ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta, S.E., M.T.

PAD Sleman terus meningkat dari tahun ke tahun berkat upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Mulai dengan jemput bola, pemantauan, hingga pemeriksaan wajib pajak.

REALISASI PENERIMAAN PAD 2019-2022

REKAPITULASI PER JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Pajak	650.161.673.278,00	499.946.066.220,00	511.399.743.153,00	763.089.850.380,00
Retribusi	57.547.074.006,00	41.034.310.565,00	38.721.417.039,00	40.382.766.287,00
Pengelolaan KD yg dipisahkan	36.733.517.628,00	47.565.772.690,28	38.164.197.265,00	38.866.059.319,80
Lain-Lain PAD	225.531.417.482,00	199.919.788.788,45	214.808.576.149,00	218.485.498.676,20
Jumlah Total Penerimaan PAD	**969.973.682.394,00**	**788.465.938.263,73**	**803.093.933.606,00**	**1.060.824.174.663,00**

Haris mencontohkan rumah makan yang ditengarai belum membayarkan pajak sesuai pendapatannya. Transaksi di rumah makan itu akan terus dipantau. Maka hasilnya bisa lebih besar dari setoran pajak sebelumnya. "Untuk pemeriksaan wajib pajak kami melibatkan kantor akuntan publik, sehingga lebih transparan," ungkapnya.

Untuk pajak jenis tertentu seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diintensifkan dengan pemeriksaan lapangan. Validasi data lapangan terkait harga tanah berfungsi mendongkrak laporan wajib pajak.

Bahkan saat pandemi, capaian BPHTB tetap tinggi meski terjadi penurunan nilai transaksi.

Haris mengatakan, pasca pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali ruang-ruang publik, pertumbuhan wajib pajak di Sleman cukup besar. Khususnya dari usaha kuliner. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. "Pemeriksaan dan pemantauan wajib pajak lama terus kami intensifkan. Juga pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru. Kami turunkan tim lapangan," jelasnya.

Menurut Haris, potensi PAD Sleman masih sangat mungkin terus bertambah. Termasuk dari sektor pajak perhotelan. Meski hal itu tergantung dengan okupansi hotel yang berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi saat ini. Pajak hotel dan restoran berbanding lurus dengan pemulihan ekonomi.

Saat pandemi, target PAD Sleman sempat diturunkan sesuai kondisi perekonomian. Kendati demikian capaiannya tetap selalu melebihi target yang ditentukan. (*)